

Valuasi Ekonomi Hutan Rawa Gambut (*Peat Swamp Forest*) dan Kaitannya terhadap Desentralisasi Fiskal: Hutan Rawa Gambut Sebangau, Kalimantan Tengah

Executive Summary

The Sebangau peat swamp forest covering 605,000 hectares is the only one of its kind remaining in Central Kalimantan Province. The area provides very important economic-ecological benefits in fostering the sustainability of the multi-generational development process within the administrative area of the province. This study demonstrates that the value of potential revenue for the Central and Local Governments (provincial and rural district/municipality) through the commercial logging of the area would be only Rp 356.9 billion over a 55-year concession term, using a 10% cash flow discount rate.

If this is compared to the economic value of the Sebangau area through its contribution to the formation of production value through the ecological functions which it performs, then, even for a low dependency scenario, this value is 1.6 times that of the potential revenue from logging. What's more, the economic value of commercial logging is still lower than that from the extraction of non timber forest products in the form of local communities' harvesting of latex of *Dyera spp* (*getah jelutung*). Nevertheless, it needs to be noted here that the economic value of the Sebangau area can only be maintained if commercial logging in the area is not practiced, either by forest concessionaires or with illegal logging practices.

The Katingan, Sebangau, and Kahayan watersheds within the Sebangau area play a very significant role in fostering sustainable economic productivity in relevant rural districts and municipality, especially for fisheries and river transportation. This study shows that even for the low dependency scenario, the economic value of fisheries (including for daily consumption) and river transportation which depend on the hydrological role of the Sebangau area has a net present value of magnitude Rp 361.45 billion over 55 years. This economic value clearly still exceeds that of the potential revenue from commercial logging in the Sebangau area (over 55 years) by Rp 4.55 billion. In other words, if commercial logging of the Sebangau area is still to be forced on it, then the community and relevant rural districts/municipality governments will of course then have to be willing to forgo the Rp 361.45 billion that is the net present value of fisheries and river transportation over a 55-year time period.

This study highlights the fact that an allocation for spatial utilization of the Sebangau area as a forestry cultivation area – in this case as a production forest – would give rise to an economic loss for the public over generations, for at least 55 years into the future. Moreover, it would reduce economic productivity of the related rural districts/municipality by stages, which would then of course have an impact in the form of a decline in economic growth.

Risalah Eksekutif

Kawasan hutan rawa gambut Sebangau seluas 605 ribu hektar merupakan hutan rawa gambut tersisa di Propinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini memberikan manfaat ekonomi-ekologi yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan proses pembangunan antargenerasi di wilayah administratif propinsi tersebut. Studi ini memperlihatkan bahwa nilai penerimaan potensial bagi pemerintah pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten/kota) melalui pemanfaatan kayu komersil yang ada di dalam kawasan hanya mencapai Rp 356,9 milyar selama 55 tahun masa konsesi dengan tingkat diskonto 10%.

Jika dibandingkan dengan nilai ekonomi kawasan Sebangau dari kontribusinya terhadap pembentukan nilai produksi melalui fungsi-fungsi ekologis yang diperankannya, maka untuk skenario ketergantungan rendah saja, nilai ekonomi kawasan Sebangau mencapai 1,6 kali lipat dari nilai penerimaan potensial kayu tersebut. Bahkan, nilai ekonomi kayu komersil tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai ekonomi dari ekstraksi hasil hutan bukan kayu berupa pemanfaatan getah jelutung oleh masyarakat sekitar kawasan. Namun, perlu dicatat di sini bahwa nilai ekonomi kawasan Sebangau tersebut hanya bisa dipertahankan jika kayu komersil di dalam kawasan tersebut tidak dieksploitasi, baik melalui izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) maupun praktik penebangan liar.

Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, Sebangau, dan Kahayan di dalam kawasan Sebangau memberikan peranan sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan produktivitas perekonomian kabupaten/kota terkait, terutama perikanan dan transportasi sungai. Studi ini memperlihatkan bahwa pada skenario rendah saja, nilai ekonomi perikanan (termasuk nilai ekonomi konsumsi ikan) dan transportasi air sungai yang bergantung pada peranan hidrologis kawasan Sebangau mencapai nilai bersih sekarang Rp 361,45 milyar (selama 55 tahun dengan tingkat diskonto 10%). Nilai ekonomi tersebut ternyata masih melebihi nilai ekonomi dari penerimaan potensial pemanfaatan kayu komersil di kawasan Sebangau (selama 55 tahun), yakni sebesar Rp 4,55 milyar. Dengan kata lain, jika pemanfaatan kayu komersil di kawasan Sebangau tetap dipaksakan, maka masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota terkait tentu harus rela untuk tidak dapat lagi menikmati nilai perikanan dan transportasi sungai sebesar Rp 361,45 milyar tersebut secara berkelanjutan selama kurun waktu 55 tahun.

Studi ini menggarisbawahi bahwa alokasi pemanfaatan ruang terhadap kawasan Sebangau sebagai kawasan budi daya kehutanan – dalam hal ini hutan produksi – akan menimbulkan nilai kerugian ekonomi bagi masyarakat antargenerasi, setidaknya selama 55 tahun. Bahkan, secara bertahap akan mengurangi produktivitas ekonomi kabupaten/kota terkait, yang tentu saja akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi.